

Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura

Mohtazul Farid, Medhy Aginta Hidayat
Universitas Trunojoyo Madura

mohtazul.farid@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This article describes the resistance of pesantren women to the practice of polygamy by the kiai in Madura. Based on the results of previous studies, there is a shift in the way Madurese women think about family life. The special status of the kiai and the patriarchal culture strongly support the practice of polygamy by the kiai. However, it began to receive rejection and resistance from women. Interestingly, the resistance actually emerged from the pesantren women. This qualitative research was conducted in Pamekasan and Bangkalan Regencies, Madura. The researcher chose these two districts, because the majority of kiai who practice polygamy exist in these two districts. Researchers interviewed 10 informants. Broadly speaking, the results of the study reveal that women who are polygamous by kiai experience violence. More forms of violence are psychological and mental. Among other things, women must experience mental pressure. There are also those who have to swallow false promises from their husbands (kiai). In responding to this inner violence, women are forced to fight, both openly and secretly. Women who fight behind closed doors. The researcher recommends that there are other studies that are not covered in this study. For example, the motif of the kiai is polygamous with a very young woman.

Keywords: *Resistance; Boarding School Women; Polygamy; Kiai*

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang perlawanan perempuan pesantren terhadap poligami kiai di Madura. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi pergeseran cara berfikir perempuan Madura mengenai kehidupan keluarga. Status kiai yang istimewa dan budaya patriarki sangat mendukung praktik poligami kiai. Akan tetapi, hal itu mulai mendapat penolakan dan perlawanan dari perempuan. Menariknya, perlawanan justru muncul dari kalangan perempuan pesantren. Penelitian kualitatif ini, dilakukan di Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan, Madura. Peneliti memilih dua kabupaten tersebut, karena mayoritas kiai yang berpoligami ada di dua kabupaten tersebut. Peneliti mewawancarai 10 informan. Terdiri dari Kiai yang berpoligami, perempuan dipoligami. Secara garis besar hasil penelitian mengungkapkan, perempuan yang dipoligami kiai mengalami kekerasan. Bentuk kekerasan lebih banyak bersifat psikologis dan mental. Antara lain, perempuan harus mengalami tekanan batin. Ada juga yang harus menelan janji palsu dari sang suami (kiai). Dalam menyikapi kekerasan batin itu, perempuan terpaksa melakukan perlawanan, baik secara terbuka maupun tertutup. Perempuan yang melawan secara tertutup, untuk menghindari hujatan keluarga dan masyarakat. Biasanya, perempuan tipe ini, lebih banyak perempuan pesantren. Peneliti merekomendasikan ada penelitian lain yang tidak tercover dalam penelitian ini. Misalnya, motif kiai berpoligami dengan wanita berusia sangat muda.

Kata Kunci: *Perlawanan, Perempuan Pesantren,, Poligami, Kiai*

1. PENDAHULUAN

Di Madura, kalangan Kiai dapat dengan mudah melakukan praktik poligami. Secara umum masyarakat Madura mengesahkan dan mendukung terus poligami yang dilakukan kiai. Mereka menilai poligami kiai sebagai hal wajar dan pantas. Menurut sebagian besar masyarakat Madura, keputusan Kiai berpoligami berdasar pertimbangan agama. Hal ini yang melahirkan perbedaan penilaian masyarakat Madura terhadap poligami Kiai dengan poligami masyarakat biasa.

Tidak heran, apabila Kiai di Madura dapat melakukan poligami dengan damai tanpa perlawanan dan kritik dari sebagian masyarakat Madura. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan poligami Kiai, lebih diterima dibanding masyarakat awam (non Kiai). Antara lain, kedudukan Kiai di Madura, sebagai sosok panutan yang harus dipatuhi dan dihormati. Hal ini tercermin dalam ungkapan *buppa'-babu'-guruh-ratoh*. Ungkapan tersebut menjadi prinsip bagi orang Madura, bahwa Kiai sebagai *ghuruh* harus dipatuhi dan dihormati setelah orang tua.

Selain itu, Kiai menggunakan dalil teologis dalam melakukan poligami. Hegemoni agama yang dibangun, poligami adalah perintah dalam Alquran surat An-nisa' dan sunnah Rasul. Faktor lain lahirnya pandangan positif masyarakat Madura terhadap poligami kiai, status sosial yang tinggi di mata masyarakat Madura. Dari sisi ekonomi, mayoritas kiai memiliki sumber pencaharian yang mapan. (Sa'dan, 2015).

Mulusnya praktik poligami Kiai di Madura, dipengaruhi pandangan tentang relasi gender dan budaya patriarki. Sebuah pengetahuan yang dibuat, bahwa laki-laki (suami) merupakan superior. Sementara perempuan adalah subordinat. Sebagai istri, perempuan harus taat kepada suami. Ketimpangan cara pandang ini mengakibatkan ruang gerak perempuan sangat terbatas pada ranah domestik. Ada sebuah doktrin dan hegemoni, bahwa

perempuan yang melawan & melawan ketentuan suami, mendapat stigma perempuan tidak baik, dan calon penghuni neraka. Apalagi suaminya dari kalangan kiai.

Legalitas praktik poligami kiai pesantren bukanlah fenomena yang berdiri sendiri dan terpisah dari konstruksi sosial. Persepsi ini lahir dari hasil pemaknaan manusia terhadap sebuah fenomena sosial. Kemudian mewarnai pemaknaan subyektif manusia. Kiai sebagai manusia yang harus dihormati, dipatuhi dan diikuti, merupakan sebuah hasil konstruksi budaya dalam masyarakat. Menurut Peter L Berger, budaya terbentuk melalui tiga tahapan. Yakni, Eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. (Musyarrofa, 2005)

Posisi perempuan dalam keluarga poligami kiai di Madura, wajib patuh terhadap suami, sekalipun dipoligami. Peran ini merupakan salah satu dampak budaya patriarki. Padahal, tidak jarang perempuan mau dipoligami karena keterpaksaan. Istri pertama harus menerima poligami sebagai bagian dari takdir yang harus diterima. Istri pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya, memiliki nasib yang sama. Terperangkap pada sistem masyarakat yang dikuasai budaya patriarki.

Hasil penelitian Siti Hikmah menunjukkan, bahwa perkawinan poligami lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya. Hak-hak perempuan banyak yang tidak dipenuhi dalam keluarga poligami. Hal ini memicu konflik para istri dan mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Baik kekerasan fisik, seksual, ekonomi lebih-lebih psikis. Untuk itu, akademisi IAIN Walisongo Semarang ini, merekomendasikan peninjauan dan telaah ulang praktek perkawinan poligami. (Hikmah, 2012).

Beberapa penelitian tentang poligami kiai di Madura, ada salah satu temuan menarik. Yakni, penelitian

Mohtazul Farid yang mengungkap proses-proses hegemoni agama dan budaya patriarki dalam poligami yang dilakukan Kiai. Dalam penelitian tersebut, terungkap, tidak semua istri poligami Kiai Madura yang bisa hidup rukun bersama istri-istri lain. Salah satunya, ada istri kiai yang memilih meninggalkan suami (Kiai). (Farid, 2017)

Menariknya lagi, justru yang melakukan hal itu, sebagian besar perempuan pesantren. Sayangnya, temuan penelitian tersebut kurang diperdalam. Untuk itu, penelitian ini ingin melihat secara lebih mendalam bagaimana model dan bentuk-bentuk perlawanan perempuan pesantren terhadap praktik poligami kiai di Madura. Secara lebih khusus, penelitian ini ingin menyusun tipologi strategi perlawanan perempuan Madura terhadap poligami Kiai.

Dalam konteks kekinian, penelitian ini memiliki nilai penting. Antara lain, sebagai salah satu upaya konkret untuk melawan sikap dan praktik legalisasi poligami Kiai yang memanfaatkan dalil agama & sunnah Nabi. Penelitian ini dilakukan di Madura. Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian sebelumnya tentang Hegemoni Patriarki dalam Poligami Kiai di Madura. Dalam penelitian tersebut, penelitian menemukan fakta menarik, bahwa dalam keluarga poligami yang kelihatan dari luar, berjalan dengan rukun tanpa ada konflik ternyata ada benih-benih perlawanan dari para istri kiai. Penolakan terhadap poligami Kiai di Madura semakin tampak, dengan adanya aksi demonstrasi kaum ibu-ibu di Bangkalan.

Di Langsa Aceh, poligami mendapat perlawanan dari perempuan. Menurut Ansor terdapat dua bentuk perlawanan perempuan terhadap poligami. Yakni secara tertutup dan terbuka. Model perlawanan perempuan beraneka ragam. Antara lain, membangkang kepada perintah suami, pura-pura baik di depan suami, gugat cerai baik secara resmi melalui pengadilan maupun tidak resmi. (Ansor, 2012). Tidak hanya itu, perlawanan

perempuan terhadap poligami meningkat di media sosial. Para istri kiai di Jember mengekspresikan penolakannya dan ditunjukkan di media sosial berada. Misalnya, meng-*upload* moment kemesraan dan kebahagiaan di media sosial. Secara tidak langsung, mengklaim kebahagiaannya dengan suami tanpa melibatkan istri lain. Tindakan ini bagian dari bentuk perlawanan perempuan, agar suaminya memilih monogami. (Jannah, Musta'in, & Yuyun Wahyu Izzati, 2020)

Di Bangkalan Madura, Kaum ibu yang mengatasnamakan Gerakan Wanita Anti Poligami (Gerwami) ini, mendatangi Kantor Bupati Bangkalan, Jumat 2 Agustus 2019. Mereka menolak keputusan KH R. Abdul Latif Imron untuk menikah lagi. Dalam aksinya puluhan emak-emak bermasker itu, mengatakan bahwa Kiai Abdul Latif, bisa adil pemberian nafkah lahir dan batin. Berkaitan dengan masalah perasaan, tidak yakin akan mampu adil. Selain itu, demonstran memberi dukungan kepada Nyi Zaenab Zuraidah (istri pertama), untuk mencabut surat persetujuan kesediaan dipoligami.

Perlawanan perempuan terhadap poligami dimulai sejak tahun 1911. Yakni, suara dari Kartini. Gugatan larangan poligami dari kongres perempuan, terjadi pertama kali pada Tahun 1928. Penolakan poligami juga disuarakan oleh Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia, pada tahun 1930. Perjuangan perempuan tersebut terus disuarakan hingga sekarang. Alasannya, dampak poligami terhadap perempuan dan anak sangat besar. Poligami lebih banyak merugikan kaum perempuan. (Hikmah, 2012)

Sayangnya, tidak banyak penelitian dan tulisan yang mengungkap perlawanan terhadap poligami kiai, belum banyak. Kajian tentang perlawanan terhadap poligami Kiai, lebih banyak analisis terhadap novel dan film. Sementara dalam kondisi nyata, belum ada yang mengungkap perlawanan perempuan terhadap poligami

Kiai, terutama di Madura. Apalagi, yang melakukan perlawanan tersebut adalah perempuan pesantren. (Santri atau perempuan yang hidup dikeluarga pesantren). Artikel ini bermaksud menggambarkan bagaimana perempuan pesantren di Madura menentang dan melawan poligami kiai di Madura. Penulis mengungkap, bentuk perlawanan terhadap poligami Kiai yang dilakukan perempuan pesantren.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Feminisme: Pijakan Perlawanan Perempuan

Sejarah pergerakan dan perlawanan kaum perempuan terhadap ketidakadilan gender, budaya patriarki dan poligami sudah lama tercatat. Setiap ada gerakan perempuan, pasti yang dibahas kesetaraan gender, budaya patriarki dan poligami. Tiga isu tersebut sangat berkaitan. Poligami merupakan satu bentuk penerapan ideologi patriarki. Apabila hal itu terjadi, maka akan muncul ketidakadilan gender.

Selama ini, gerakan dan perlawanan perempuan terhadap poligami, memang lebih banyak ditampilkan dalam gerakan halus. Salah satunya, melalui naskah-naskah cerpen atau adegan dan percakapan dalam sebuah film. Seperti dalam film *Potiche* karya Francois Ozon, (Kusumandari, 2014), Film "*berbagi suami*". Film ini banyak memuat dialog tokoh perempuan yang menunjukkan perlawanan terhadap poligami. Terdapat beberapa naskah yang sengaja dibuat untuk menunjukkan resistensi perempuan. (Corliana, 2017). Perlawanan perempuan terhadap budaya patriarkat, juga tertulis dalam novel *Nayla* karya Djenar Maesa Ayu. (Norannabiela, 2013) dan Novel *Entrok* Karya Okky Madasari (Gamas, 2012).

Representasi perlawanan perempuan terhadap praktik poligami juga banyak terlihat kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan Mila, wanita asal Aceh menjadi satu bagian resistensi perempuan ketika

dipoligami. Nurmila menolak poligami sekalipun Allah tidak melarang poligami, dengan alasan laki-laki tidak akan mampu berbuat adil. Dalam poligami tidak akan ada keadilan dalam hal batiniah. (Ansor, 2012).

Ada tiga cara perempuan menanggapi poligami. Akomodasi, semi akomodasi dan resistan. Pengelompokan ini berdasarkan tingkat pemahaman perempuan terhadap al-Qur'an dan hadis. Perempuan yang memahami ayat poligami hanya berdasar teks, cenderung akan menerima diskursus poligami. Tingkat pemahaman semi tekstualis akan menentang poligami, sekalipun samar dan tertutup. Perempuan bakal menolak poligami secara terang-terangan dan tegas, ketika memahami sumber hukum poligami secara kontekstual. (Nurmila, 2011).

Perempuan menolak poligami dengan berbagai cara. Antara lain, tidak mau diajak bicara, melabrak istri muda, menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain, menggugat cerai, tidak mengikuti perintah suami. (Ansor, 2012). Tidak hanya itu, perempuan juga ada yang nekat melakukan kekerasan fisik. Seperti yang dilakukan Maryati. Perempuan asal Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kab. Sumenep ini, nekat memotong alat vital suaminya. Tujuannya, agar suaminya berhenti menikah lagi dengan perempuan lain. (JPNN, edisi 23 Februari 2013). Melihat peristiwa yang sangat fenomenal itu, terlihat jelas, bahwa perempuan Madura juga memiliki resistensi terhadap poligami. Hanya saja, resistensi itu lebih sering terjadi pada laki-laki yang bukan biasa. Sementara, untuk perempuan yang dipoligami oleh Kiai, rata-rata tidak mampu melawan alias lebih banyak menerima. Mereka meyakini sebagai bagian dari takdir Tuhan.

Beberapa gerakan perlawanan perempuan tersebut, secara tidak langsung juga diilhami pandangan feminisme. Teori feminisme sebagai filsafat dan gerakan sosial, muncul menjelma menjadi sebuah kesadaran. Ajak pijakan itu, perempuan

sadar sebagai golongan yang sering dirugikan dengan budaya patriarki. Sebagai bagian dari teori gerakan sosial, feminisme terikat sejarah panjang. Charles Fourier adalah filsuf Prancis yang pertama kali menggunakan istilah feminisme pada tahun 1837. Tahun 1872, istilah feminisme berkembang di Belanda dan Prancis. Fahaman feminisme baru masuk Indonesia tahun 1970-an. Isu Feminisme muncul di berbagai surat kabar, jurnal dan buku. (Warsito, 2012).

Gerakan feminisme di Indonesia sebagai respon dari banyaknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Baik kekerasan secara fisik, psikis maupun mental. Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Gerakan ini menjadi titik kesadaran yang mendorong kaum perempuan sadar akan hak sebagai warga Negara. Aliran feminis tidak hanya sebatas teori. Gerakan ini juga menjadi sebuah tindakan konkrit untuk membangun kesadaran wanita. Terutama, perempuan yang memiliki pengalaman pahit pemahaman kebenaran yang keliru, pengetahuan terbatas dan korban kekuasaan. (Fakih, 1996).

Untuk itu, ada beberapa titik utama yang diperjuangkan kaum feminis. *Pertama*, terkait kesetaraan gender. Gerakan ini berupaya menghapus ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Termasuk peran perempuan dalam ranah domestik dan karir. *Kedua*, Keseimbangan Gender. Gerakan ini ingin membebaskan perempuan dari rasisme, *stereotyping*, seksisme, penindasan serta *phallogosentrisme*. *Ketiga*, menolak diskriminasi akibat budaya patriarki. Budaya yang selalu mengutamakan garis laki-laki merupakan bentuk diskriminasi yang sangat merugikan perempuan. Bahkan, ini dijadikan kesempatan untuk menindas kaum perempuan. Misalnya seperti poligami. *Keempat*, persamaan hak perempuan dalam urusan politik. Gerakan ini bertujuan untuk melibatkan perempuan

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum perempuan, seperti wacana perda poligami. Output gerakan ini melahirkan ketentuan kuota 30 persen perempuan dalam politik dan birokrasi. (Lovenduski, 2008).

Teori feminisme memiliki beberapa aliran. Antara lain, sekte radikal, liberal, anarkis, marxis dan post modern. Feminisme radikal ini lahir sebagai respon terhadap tradisi aliran seksis atau dominasi kaum laki-laki di Negara Barat. Gerakan yang lahir tahun 1960 an ini, menentang kekerasan seksual dan industri pornografi. Menurut sekte radikal, penindasan terhadap perempuan merupakan sebuah realitas yang dilahirkan dari sistem sosial dalam masyarakat. Untuk itu, harus dilawan dan dihentikan. (Gaus & Kukathas, 2013). Aliran liberal melihat perempuan sebagai individu yang bebas dan merdeka. Perempuan memiliki kebebasan atas diri dan tubuhnya. Persamaan, kebebasan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan rasionalitas secara terpisah antara ranah pribadi dan publik.

Untuk itu, aliran feminisme anarkisme merekomendasikan untuk menghapus budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam masyarakat. Mazhab ini menilai, budaya patriarki sebagai sumber utama persoalan yang menimpa perempuan. Pandangan ini mirip dengan aliran Feminisme Marxis. Penindasan terhadap perempuan bersumber dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Dasar dari pandangan ini adalah teori Friedrich Engels. Dalam realitas, perempuan tidak berdaya ketika berkaitan dengan ekonomi. Dunia kerja mayoritas dikuasai oleh laki-laki. Sehingga, aliran ini berasumsi bahwa posisi perempuan rendah akibat konsep kekayaan pribadi (*private property*). Ini terbukti, banyak perempuan yang masih mudah dan berparas cantik, bersedia menjadi istri kesekian dari laki-laki yang lebih tua, tetapi kaya, memiliki jabatan dan status sosial yang tinggi. Terakhir, feminisme post

Modern. Aliran penolak absolut dan otoritas ini, menegaskan bahwa gender tidak identik dengan identitas atau struktur sosial. Gender merupakan pemisahan dan perbedaan yang mengarah jenis kelamin, bukan peran dan hak. (Gaus & Kukathas, 2013:650).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ilmu sosial, fenomenologi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggali dan mengungkapkan makna tersembunyi di balik pengalaman-pengalaman subjek (Creswell, 2013).

Pendekatan fenomenologi dipilih, untuk membongkar makna universal di balik fenomena subjektif yang dialami oleh subjek informan. Salah satu aspek penting metode fenomenologi adalah proses "*bracketing out*". Peneliti harus menanggalkan pengalaman dan dugaan-dugaan pribadi, pada saat tahapan-tahapan penelitian. (Creswell, 2013). Dalam konteks penelitian ini, melalui proses analisis fenomenologis, diharapkan akan diperoleh pemahaman tentang strategi negosiasi identitas etnik Tionghoa dalam hubungan antaretnik dan antaragama di Madura.

Sebelum *start* penelitian, peneliti melakukan observasi lapangan guna memperoleh pemahaman awal mengenai lokasi dan subjek penelitian. Observasi dilakukan di daerah yang banyak kiai berpoligami, di Madura. Penentuan informan menyesuaikan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Informan terbagi dua kategori, yakni informan utama dan pendukung. Informan utama adalah perempuan yang lahir dan besar di pesantren, baik sebagai keluarga pesantren maupun santri. Perempuan yang sudah pernah atau masih hidup dalam keluarga poligami Kiai di Madura. Sementara itu, informan pendukung adalah

para kiai yang melakukan poligami dan masyarakat sekitar pesantren.

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sumber data sekunder (rujukan literatur, berita media, dokumentasi ilmiah, gambar dan foto), dan sumber data primer melalui pengamatan lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan bantuan panduan wawancara dan direkam secara digital. Data hasil wawancara selanjutnya akan ditranskrip dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dilakukan proses analisis.

Peneliti menganalisis data melalui tiga jenjang (Creswell, 2013). Pertama, pembacaan data & pembuatan kode (*coding*), kluster (*clustering*) atau label (*labelling*) berdasarkan tema-tema yang paling muncul dalam proses wawancara. Dalam tahap ini juga dilakukan reduksi data yang tidak diperlukan. Kedua, proses pemilahan data sesuai tema yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tidak semua tema yang muncul relevan dengan pertanyaan penelitian. Ketiga, melakukan interpretasi dan sintesis data hasil wawancara bersifat subjektif dan mengabstraksikannya agar ditemukan makna objektif dari temuan fenomena di lapangan. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan menyusun skema model berdasarkan hasil analisis model perlawanan perempuan pesantren terhadap praktik poligami Kiai di Madura.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kiai Madura dan Poligami

Kajian dan penelitian tentang poligami Kiai di Madura, sudah banyak dilakukan. Meski begitu, belum ada yang secara khusus membahas sejarah berkembangnya tradisi poligami di kalangan Kiai Madura. Penelitian poligami Kiai mayoritas hanya membahas proses, jumlah istri, respon masyarakat dan cara Kiai menghegemoni

masyarakat dengan menggunakan dalil agama. Dari beberapa tulisan dan penelitian, praktik poligami Kiai di Madura, sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan, dapat menjadi indikator kedigdayaan kiai.

Dari dulu hingga sekarang, tradisi poligami di kalangan para kiai pesantren terus terjadi dan dilestarikan. Para kiai Madura yang suka berpoligami membentuk sebuah komunitas para kiai pecinta poligami. Komunitas ini menjadi sebuah relasi antar kiai dalam mencari istri-istri baru. Santri yang sudah berhenti dari pesantren (alumni) terus menjalin hubungan. Utamanya, santri-santri yang mampu membangun pesantren-pesantren baru. Ini yang melahirkan status kiai besar dan kecil. Hubungan dan komunikasi Kiai dengan santri alumni, tidak sebatas pada urusan pesantren atau syiar Islam. Hubungan baik antara Kiai dan santri alumni, terkadang dimanfaatkan kiai untuk mendapatkan istri. (Farid, 2017)

Sebagian besar masyarakat Madura menilai positif terhadap praktik poligami kiai. Hal ini berbeda, ketika yang berpoligami dari kalangan orang biasa (non kiai). Masyarakat terkadang menawarkan perempuan (anak, tetangga dan familinya) untuk dipoligami oleh kiai. Masyarakat merasa ada sebuah nilai lebih, apabila menjadi istri Kiai, sekalipun menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Rata-rata istri kiai di Madura lebih dari dari 2, bahkan ada Kiai Madura yang memiliki istri 12 orang.

Ada sebuah pemahaman *normatif-humanistis* yang melekat pada masyarakat Madura. Sehingga mereka seolah-olah merestui kiai berpoligami. Roibin mengungkapkan setidaknya ada 7 persepsi masyarakat tentang poligami kiai. *Pertama*, perempuan yang menjadi istri kiai akan terangkat harkat dan martabatnya. *Kedua*, status sosial si perempuan akan berubah, dari kaum biasa menjadi golongan nyai. *Ketiga*, misi ibadah. Yakni menjadi patner kiai dalam menyebarkan syiar-syiar islam. *Keempat*, anak yang dilahirkan akan

menjadi calon kiai yang memiliki status sosial istimewa di masyarakat. *Kelima*, dapat memperbanyak kader muslim yang berakhlak mulia. *Keenam*, melestarikan tradisi tolong menolong. *Terakhir*, Kiai berpoligami atas dasar anjuran agama. (Roibin, 2007)

Dengan adanya pemahaman normatif-humanistis tersebut, masyarakat Madura tidak pernah mempersoalkan kiai berpoligami. Bahkan, masyarakat sudah menganggap, poligami kiai bukan wilayahnya untuk diperbicangkan. Padahal, tanpa disadari persepsi masyarakat tentang poligami kiai, sengaja dibentuk untuk menjadi pengetahuan masyarakat. Interpretasi teks al-quran yang bias gender menjadi alat doktrin kepada masyarakat. Sehingga Poligami kiai Madura, berjalan mulus tanpa penolakan dan perlawanan dari mayoritas masyarakat.

Kiai melakukan doktrinisasi pengetahuan tersebut kepada masyarakat melalui media yang dimiliki. Salah satunya, pondok pesantren. Seperti diketahui, khususnya di Madura, pria yang memiliki label kiai, selain memiliki pemahaman agama yang tinggi, Kiai juga identik pondok pesantren yang diasuhnya. Semakin banyak santri maka semakin besar pesantrennya, begitu juga dengan status ke Kiai-an seseorang. Tidak salah, apabila santri merupakan salah alat produksi status Kiai dalam Masyarakat, khususnya di Madura.

Pesantren menjadi salah satu media Kiai dalam melakukan doktrinisasi pengetahuan agama. Menurut Zamachsari Dhofier, pesantren menjadi istitusi agama paling efektif untuk sosialisasi ilmu agama. Salah satunya sosialisasi pengetahuan tentang gender kepada santri yang masih berusia muda. Di pesantren, santri mendapatkan ilmu tentang cara berperilaku laki-laki dan perempuan. Sehingga santri putra dan putri bertindak sesuai pesan kiai yang disampaikan selama menjadi santri. Santri dapat memahami identitas, norma-norma tuntutan, pola perilaku, sikap dan

simbol-simbol, berdasarkan jenis kelamin. (Dhofier, 2011).

Termasuk penanaman pengetahuan dan cara berperilaku perempuan terhadap laki-laki. Cara berperilaku seorang istri kepada suaminya. Di pesantren juga ada transfer pengetahuan agama yang mengatakan, bahwa perempuan yang bersedia dan ikhlas dipoligami, memperoleh pahala yang besar. Padahal, jika melihat dari sisi perempuan yang dipoligami, berbagi suami bukan kodrat dari seorang perempuan. Victoria Burbank (1994) melakukan penelitian tentang poligami di Afrika Barat dan Bolivia. Hasilnya mengungkap, dalam keluarga poligami selalu ada kompetisi dan kecemburuan antar istri. Persaingan antar istri tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan, bahkan hingga pembunuhan yang dipicu sikap tidak adil seorang suami dalam membagi jatah makanan dan warisan. (Sa'dan, 2015). Kondisi ini, sebenarnya juga terjadi pada keluarga poligami di Madura. Perempuan yang dipoligami kiai dan non kiai, kerap mengalami kekerasan, tekanan psikologis. Hanya saja sebagian besar mereka memilih bertahan dan memendam pengalaman pahit tersebut. Bagi perempuan yang tidak mampu bersabar, maka akan melakukan pemberontakan baik secara terbuka maupun tersembunyi.

4.2 Jurus Kiai Menaklukkan Perempuan

Secara umum, menurut ajaran Islam pernikahan bertujuan, menjalankan perintah Allah dan rasulnya, menyempurnakan agama dan regenerasi manusia. Tujuan itu dapat tercapai dengan pernikahan pertama. Untuk itu, pada awal menikah, jarang ada yang berfikir menikah lagi. Kiai yang menjadi informan penelitian ini, juga sama. Kiai Toha dan Kiai Nur, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menambah istri. Hasrat berpoligami muncul setelah beberapa tahun menikahi istri pertama. Dorongan biologis menjadi salah satu pemicu poligami kiai. Menurut Kiai Toha

dan Kiai Nur, poligami untuk pemenuhan biologis, hal wajar. Alasannya, manusia memang diberikan akal dan nafsu.

"Manusia memang dihiasi nafsu. Itu sudah jelas dalam Al-qur'an. Yang penting menyalurkan hasrat biologis sesuai ajaran Islam. Misalnya kita suka pada perempuan lain selain istri, maka nikahilah," Wawancara Kiai Toha.

Kiai Toha menikah sebanyak 6 kali. Saat peneliti wawancara, hanya 3 istri yang tinggal satu rumah dengan Kiai Toha, di Desa Keleyan, Kec Socah, Kab Bangkalan. Kepada peneliti, Kiai Toha menceritakan, dirinya menikahi istri pertama, Muslihah, pada tahun 1988. Pada saat itu, Kiai Toha berusia 23 tahun. Muslihah berusia 16 tahun. Perempuan asal Desa Kokop ini, merupakan santri di pondok pesantren asuhan teman Kiai Toha.

Setelah 4 tahun menikah, lahir 2 anak dari rahim Muslihah. Pada tahun 1991, Kiai Toha harus berangkat ke Makkah untuk mengaji sekaligus mencari uang. Saat itu, Muslihah tidak dibawa ke Makkah karena sedang hamil muda anak ke 3. Selama setahun tinggal di Makkah tanpa istri, Kiai Toha merasa kesepian. Pada tahun 1993 awal, Kiai Toha menikah dengan istri kedua, Habibah, di Makkah. Perempuan berusia 7 tahun lebih tua dari Kiai Toha, adalah warga Arosbaya Bangkalan, tetapi sudah lama tinggal di Makkah. Kiai mengenal Habibah dari teman asli Madura, di Makkah.

"Saya tidak mencari sendiri, tetapi ditawarkan oleh keluarga istri (Habibah). Mereka sering menggojlok karena saya sendiri. Akhirnya saya jawab, carikan kalau ada dan mau. Ternyata dicarikan beneran dan Habibah mau," Wawancara Kiai Toha.

Meski Habibah bersedia dinikahi kiai beristri, tetapi Kiai Toha harus mendapat izin Muslihah selaku istri pertama. Untuk mendapat izin Muslihah, Kiai Toha harus

merayu berkali-kali. Muslihah yang saat itu ada di Madura, memiliki sifat cemburu berlebihan. Terbukti, apabila Kiai Toha melihat foto perempuan lain, Muslihah marah dan ngambek. Apalagi, Kiai Toha minta izin menikah lagi di tanah rantau.

Kiai Toha memiliki jurus ampuh menaklukkan Muslihah, hingga mendapat lampu hijau untuk menikah lagi. Agama menjadi jurus utama. Dia meyakinkan Muslihah, bahwa agama tidak melarang poligami, asalkan syaratnya terpenuhi. Syaratnya antara lain, tinggal sendiri dalam waktu lama, mampu adil dan mendapat izin istri pertama. Kiai menegaskan kepada istri pertama, jika Allah sudah membolehkan, masak manusia (Muslihah) mau melarang. Hal inilah, yang membuat Muslihah mengizinkan suaminya menikahi Habibah di Makkah sebagai istri kedua. Ada kesan, jika tidak mengizinkan, Muslihah akan berdosa karena dirinya tidak dapat menemani dan melayani suami di tempat perantauan.

Hal ini yang disebut Masthuriyah Sa'dan, bahwa Kiai Madura kerap menggunakan dalil teologis untuk mendapatkan tiket emas poligami dari istri pertama. Dalih yang dikedepankan adalah agama bukan masalah libido. Padahal, sebenarnya Kiai menikah lagi untuk memenuhi tuntutan biologis dengan memanfaatkan fasilitas teologis. Realitas ini yang mengakibatkan kiai dapat melakukan poligami tanpa perlawanan dari mayoritas masyarakat Madura. Di sisi lain, motif perempuan bersedia dimadu, yakni ekonomi dan keterbatasan pemahaman tentang dalil poligami yang termaktub dalam Al-Quran. (Sa'dan, 2015)

Poligami kiai bermotif biologis semakin terlihat dengan fakta pernikahan Kiai Toha dengan istri ke 3, Nur Sholihah. Tenaga kerja wanita (TKW) asal Lampung ini, dinikahi tidak berselang lama setelah pernikahan Kiai Toha dengan Habibah. Saat dinikahi, perempuan yang bertemu Kiai Toha di salon kecantikan ini, berusia 18 tahun. Usia yang masih muda, semakin

memperkuat adanya motif biologis dalam poligami Kiai. Lagi-lagi, Kiai Toha mendoktrin Nur Sholihah dengan dalil teologis. Kiai Toha menyarankan Nur Sholihah Istiharah sebelum memutuskan menerima atau menolak dipoligami. Selain itu, masukan dan pendapat teman-teman kiai Toha, mampu merubah keputusan Nur Sholihah. Semula tidak mau dinikahi pria beristri, akhirnya bersedia. Apalagi, orang tua Nur Sholihah sangat mendukung dengan alasan Kiai Toha merupakan Kiai besar di Madura. Sekalipun sebagai menantu, kedua orang tua Nur Sholihah tetap memperlakukan Kiai Toha layaknya gurunya.

"Saat Saya datang ke rumah istri ke tiga di Lampung, mertua saya tetap melayani saya seperti guru dan murid. Ketika bercengkrama mertua saya tidak mau duduk di atas takut cangkolang (sουλ Adzab alias tidak sopan) katanya. Wawancara Kiai Toha.

Penghormatan masyarakat terhadap kiai acap kali dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak para kiai di Madura. Seperti kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka dari itu, tidak heran apabila, kiai mendapat tawaran menikah lagi dari masyarakat. Penawaran lengkap dengan perempuan yang disiapkan untuk dinikahi kiai. Realitas ini lahir dari pemahaman dan persepsi masyarakat, bahwa kiai selalu bertindak berdasarkan agama. Termasuk ketika kiai berpoligami dinilai sebagai bagian dari cara kiai memperbanyak umat nabi Muhammad serta sarana ibadah.

Jurus lain dalam menundukkan perempuan adalah Modal sosial. Kiai memiliki relasi sosial yang bagus dan luas dengan masyarakat, santri lulusan pesantren yang diasu. Modal sosial ini sangat mendukung proses kiai mendapatkan istri muda dengan mudah. Otoritas dan karisma yang melekat pada kiai, menjadi daya tarik sendiri. Hal ini melahirkan kekaguman dan kepercayaan masyarakat. Ada proses

pengkultusan dari masyarakat terhadap pribadi kiai. Kiai diyakini mempunyai *karomah* dan mendatangkan *barokah*. Sehingga Masyarakat suka membenarkan segala tindakan kiai atas dasar penghormatan kepada kiai.

Setelah menikahi Habibah dan Nur Sholihah, Kiai Toha pulang kampung ke Madura, pada tahun 1997. Di Madura, Kiai Toha hidup bersama tiga istrinya dalam satu rumah, di Desa Keleyan, Kec. Socah, Bangkalan. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2000, hasrat untuk menambah istri muncul lagi. Itu setelah, istri kedua, Habibah minggat tanpa pamit. Untuk mendapatkan istri ke 4, Kiai Toha meminta 2 istrinya untuk mencarikan. Beralih untuk menyenangkan suami, Muslihah dan Nur sholiha mencari perempuan yang mau dipoligami. Usahnya berhasil. Kiai Toha menikah dengan Siti Halimah. Saat dinikahi, perempuan asal Desa Paeng, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, ini masih berusia 18 tahun. Pada pernikahan ke 4 ini, Kiai Toha mengaku, ingin menambah keturunan. Dia meyakini, semakin banyak anak semakin banyak rezeqi.

Tahapan dan proses poligami Kiai Toha mirip dengan poligami Kiai Nuruttamam Bukhori. Kiai yang masih muda ini, adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Sebagai pimpinan pesantren dan keturunan ulama besar di Pamekasan, Kiai Nur, panggilan Nuruttamam Bukhori, sangat dihormati, disegani dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Alumni salah satu pesantren tertua di Kota Gerbang Salam ini, menikah pertama kali dengan putri kiai, yakni Nurul Maulidah. Pernikahan Kiai dengan Nyai Nurul Maulidah hasil perjodohan sesame orang tua. Setelah dua tahun menikah, terpikat pada perempuan lain dan berhasrat untuk menikahi. Tetapi, hasrat itu mendapat penolakan dan perlawanan dari keluarga besar istri pertama. Bahkan, orang tua Nurul Maulida, hendak

membawa pulang paksa istri Kiai Nur tersebut.

Meski ditentang keluarga besar istri pertama, Kiai Nur tetap berusaha meyakinkan dan bertahan dengan prinsipnya, bahwa poligami tidak melanggar aturan agama. Bagi Kiai Nur, poligami merupakan bagian dari perintah Allah yang tertuang dalam al-Quran. Perintah Allah wajib dilaksanakan selagi mampu. Kiai Nur mampu melunakkan hati Nurul Maulidah dengan dalil teologis. Nurul bersedia berbagi suami setelah berhasil didoktrin, bahwa poligami adalah perintah yang harus dilaksanakan, pahalanya sangat besar.

Kiai Nur menikahi santrinya sebagai istri kedua. Saat dinikahi, Maslotul Aini baru lulus Madrasah Aliyah (MA) setara SMA. Perempuan yang sejak kecil hidup di pesantren, ini tidak kuasa menolak lamaran kiai-nya. Apalagi, orang tuanya sudah menyetujui dirinya dinikahi Kiai Nur. Meski kondisi tersebut sangat memukul batinnya, Maslotul Aini tetap menjalani keluarga poligami. Keluarga besarnya memberi dukungan moral, bahwa apa yang dialami adalah yang terbaik dan sudah bagian takdir. Pernikahan Kiai Nur dengan Maslotul Aini tidak bertahan lama dan bercerai. Pemicunya, Maslotul Aini tidak mampu menyimpan rasa cemburu kepada istri pertama.

Petualangan Kiai Nur tidak berhenti. Setelah beberapa bulan bercerai dengan istri ke 2, Habib Ali, teman Kiai Nur, menawarkan perempuan. Nur Wasilah adalah keponakan Habib Ali sendiri. Pada saat itu usia Nur Wasilah masih 17 tahun. Tidak berbeda dengan perempuan umumnya, Wasilah sangat menolak lamaran Kiai Nur. Wasilah tidak bersedia, selain karena perbedaan usia sangat jauh, juga karena poligami. Wasilah ingin menikah secara monogami. Dia takut dinilai sebagai pelakor dan tidak yakin bisa hidup bersama istri pertama. Lagi-lagi, paman Wasilah merayu dan mendoktrin dengan dalil agama. Akhirnya Wasilah bersedia dinikahi Kiai

sebagai istri ketiga. Pernikahan Kiai Nur dengan Wasilah hanya berjalan 1,5 tahun. Kiai Nur memutuskan akad nikah dengan Wasilah atas permintaan istri pertama, Nurul Maulidah.

"Wasilah terlalu kanak-kanak pikirannya, kurang stabil. Sering emosi dan cemburu berlebihan. Tidak bisa diajak berjuang bersama menegakkan agama Allah," Wawancara Kiai Nuruttaman Buchori.

Setelah gagal membangun keluarga poligami dengan Maslotul Aini dan Nur Wasilah, Kiai Nur tidak menambah istri. Setelah 12 tahun hidup berdua dengan istri pertama, Kiai kembali menikah dengan perempuan berusia 16 tahun. Kiai Nur mengenal Soleha melalui perantara temannya di Jember. pernikahannya dengan perempuan kelahiran Jember ini, hanya bertahan 2 tahun. Soleha menolak tinggal satu rumah dengan istri pertama. Dia menuntut Kiai Nur membuat rumah sendiri, terpisah dari rumah istri pertama. Tuntutan rumah itu bagi Kiai Nur, tidak pantas. Suami berpoligami harus mampu mengumpulkan para istri dalam satu rumah dengan damai. Kemampuan suami menyatukan para istri serumah sebagai bukti laki-laki dapat memimpin dalam keluarga. Kiai Nur tidak akan berpoligami dengan perempuan yang tidak hidup bersama secara rukun dan saling tolong menolong.

Terakhir Kiai Nur menikah dengan janda anak dua, Siti Aisyah. Perempuan asal Jember ini, dikenalkan oleh kakak kandung Kiai Nur. Sebelum menikahi Siti Aisyah, Kiai sudah 2 kali menikah tanpa sepengetahuan istri pertama. Namun, tidak bertahan lama. Kiai Nur juga tidak bersedia menyebut identitasnya. Dengan demikian, Siti Aisyah merupakan perempuan ke 7 yang dinikahi Kiai Nur. Sebelum dinikahi, kondisi ekonomi Siti Aisyah sudah mapan. Dia dari keluarga berpengaruh di desanya. Kenapa saat diajak menikah oleh pria yang sudah beristri langsung mau?, Ra Nur

menjelaskan, istrinya yang ke 7 itu, memang mendambakan suami seorang kiai. Aisyah merasa yakin, suami dari golongan kiai yang akan membawa pada jalan yang lebih baik. Bahkan, menurut Ra Nur, Nurul Maulida, istri pertama, dan Siti Aisyah, istri ke tujuh, kini sudah masuk pada tahapan bangga hidup dalam keluarga poligami. Tidak heran, jika kedua selalu mendukung Ra Nur untuk menambah istri lagi sampai batas yang sudah digariskan oleh Allah dalam surat An-nisa' ayat 3.

4.3 Pasang Surut Sikap Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai

Praktik poligami di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan. Dalam tulisan Ach. Faisol memotret, 5 fase perkembangan poligami di Indonesia. *Pertama*, zaman dulu hanya golongan para raja yang melakukan poligami. Saat ini, seiring perkembangan zaman lenyapnya masa kerajaan, poligami banyak dipraktekkan oleh masyarakat biasa. *Kedua*, Padangan masyarakat terhadap poligami ada yang setuju dan menolak. Sikap penolakan masih bersifat samar alias secara diam-diam. *Ketiga*, praktek poligami menjadi diskursus yang mengundang pro dan kontra secara terbuka. *Keempat*, Penolakan terhadap poligami semakin menguat dan terang-terangan, kecuali poligami kiai dan pejabat berpengaruh. *Terkahir*, ada perlawanan secara nyata terhadap poligami dari kalangan perempuan. Lahir kalangan pendukung monogami sebagai perkawinan yang ideal. (Faisol, 2016)

Dalam menolak poligami, perempuan melakukan berbagai cara. Secara terbuka atau tertutup. Hasil Kajian Ansor terhadap perempuan Langsa di Aceh, mengungkap ada dua model perlawanan. Yakni tertutup dan terbuka. Perlawanan tertutup tidak sampai pada perceraian. Misalnya, mereka mencemarkan nama baik istri kedua dan berpura-pura patuh di depan suami, padahal di belakang menolak kebijakan suami dalam pengaturan rumah

tangga. Untuk perempuan yang melawan secara terang-terangan minta cerai tanpa melalui pengadilan. (Ansor, 2012)

4.3 Perlawanan Terbuka Dari Luar Keluarga Poligami Kiai

Di Madura, perlawanan perempuan pesantren terhadap poligami kiai terjadi pada dua moment. Yakni, sebelum dipoligami dan setelah poligami berlangsung. Perlawanan datang dari perempuan yang menjadi istri pertama, kedua, ketiga kiai. Penolakan juga datang dari luar keluarga poligami. Seperti yang dilakukan oleh simpatisan pendukung istri Bupati Bangkalan, KH. Abdul Latif Imron. Puluhan ibu rumah tangga dari Gerakan Wanita Anti Poligami (Gerwami) Kabupaten Bangkalan, itu melakukan aksi penolakan poligami di Kantor Pemkab dan Gedung DPRD Bangkalan, Jum'at (2/8/2019) pagi.

"Kami Gerwami menolak keputusan Bupati Bangkalan untuk berpoligami dengan perempuan lain untuk menjadi istri kedua. Kami benar-benar sangat kecewa jika KH. Abdul Latif Imron menikah lagi. Kami mendukung Nyai Zainab (istri pertama) untuk mencabut surat kesediaan untuk dimadu," ungkap Saniyah, salah satu anggota Gerwani Bangkalan.

Menurut Saniyah, praktik poligami cenderung memunculkan perilaku kepemimpinan yang korup. Pasalnya, pejabat yang berpoligami dipaksa memenuhi kebutuhan hidup para istri-istrinya dan sangat rentan memanfaatkan fasilitas dan anggaran negara. Untuk itu, dia juga menolak Perda poligami.

Dalam kasus ini, para perempuan pesantren ini menegaskan, apa yang dilakukan dalam menolak poligami, bukan bagian dari ketidakpatuhan kepada Kiai dan suami. Dia hanya menegaskan bahwa, dalam keluarga, suami tidak boleh membuat keputusan sepihak. Apa yang akan dilakukan suami, apalagi berkaitan dengan

rencana menikah lagi, harus mempertimbangkan kondisi dan perasaan perempuan. Menurut Saniyah, tidak ada satupun perempuan di dunia ini, yang rela dimadu. Istri yang menjadi istri poligami kiai, mayoritas karena keterpaksaan. Para istri jarang diajak berbicara dari hati ke hati tentang poligami. Tidak sedikit, para istri kiai, menyetujui poligami atas dasar peran perempuan sebagai istri, yang harus patuh terhadap suami. Termasuk, patuh ketika dirinya dimadu oleh suaminya. Status Kiai sebagai orang yang dihormati di Madura, semakin memperkuat posisi suami dalam rumah tangga.

Kontek ini yang kemudian melahirkan pertanyaan mendasar dari feminis, kenapa dan seperti apa ketidakadilan pada perempuan yang dilahirkan dari perbedaan gender dan budaya patriarki. Feminis radikal *Kate Millet* meyakini, faktor penyebab ketidakadilan gender dalam keluarga, salah satunya karena relasi kuasa laki-laki yang dominan terhadap perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan berdasar pada struktur kekuasaan. laki-laki sebagai pengendali perempuan. Institusi utama struktur ini adalah keluarga. (Mansour Fakih: 1996). Kaum feminis radikal dan eksistensial, menilai keluarga sebagai sumber penindasan dan ajang objektifikasi perempuan. Bahkan, *Mary Wollstonecraft* mengatakan perkawinan sebagai prostitusi legal. Dia beralasan, dalam perkawinan laki-laki dapat mengontrol dan melindungi perempuan dari ancaman seksualitas laki-laki. faktanya tidak jarang perkawinan menjadi pintu tempat kekerasan domestik. (Mary Wollstonecraft: 1992).

Posisi perempuan sebagai istri dalam keluarga menjadi pihak yang dipimpin. laki-laki sebagai suami menjadi pemimpin. Efeknya, istri tidak berhak memutuskan sesuatu dalam keluarga tanpa persetujuan suami. Pada kasus poligami sudah kelihatan, perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan terutama secara psikologis.

Perempuan dipaksa untuk menerima poligami dengan dalih ibadah, mendukung kiai dalam memperbanyak keturunan dan mencegah laki-laki dari penyelewengan seksual. Argumentasi tersebut, bagi kalangan feminis dianggap bagian dari ideologi patriarki yang sangat merugikan perempuan.

4.4 Perlawanan Dari Dalam Keluarga Poligami Kiai

Model perlawanan ini muncul setelah perempuan pesantren menjalani rumah tangga dalam keluarga poligami. Pada mulanya, si perempuan bersedia menikah dengan kiai yang sudah beristri. Setelah berjalan beberapa bulan dan tahun, muncul penolakan dan gejolak dari istri kiai yang dipoligami. Motif penolakannya bermacam-macam. Mulai rasa cemburu, ingkar janji dan konflik antar istri kiai. Seperti yang dialami keluarga poligami Kiai berinisial MF. Kiai yang masih keturunan ulama besar di Bangkalan ini, menikah tahun 2013 dengan NH, istri pertama. Setelah pernikahan berjalan sekitar 2 tahun, MF dan NH dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian, MF menikah lagi dengan perempuan berinisial AL. Informasi yang beredar, AL merupakan istri siri MF sebelum menikah dengan NH. Cinta segitiga dalam keluarga MF, NH dan AL berujung konflik. Meski demikian, MF masih berencana menikahi perempuan lain, yakni AV.

"MF datang ke rumah menemui papa saya. Dia bersama 2 pamannya. Dia mengaku duda dan menunjukkan surat cerai dengan istri pertama (NH). Setelah berjalan 5 bulan, Saya memilih pergi dari kehidupan MF, karena ternyata sudah punya 2 istri. Saya tidak mau lah dipoligami, sekalipun MF itu Kiai dan Pejabat," Wawancara dengan AV, Agustus 2020.

Menurut AV, perempuan harus memiliki kemerdekaan untuk menolak dan menerima pria yang akan menikahi. AV menolak poligami karena tidak bisa berbagi suami dengan wanita lain. Selain itu, bagi AV, menjadi istri ketiga melahirkan kesan tidak baik bagi masyarakat. Perempuan yang menjadi istri ketiga, pasti dinilai sebagai perebut suami orang (pelakor). Kondisi ini yang sangat membuat AV tidak nyaman dan menolak poligami. Pernyataan yang sama, keluar dari istri MF lain, AL. Tindakan yang dilakukan AL terhadap MF sangat keras. Dia meminta MF menceraikan istri sahnya, NH. Dia mengaku istri pertama, yang dinikahi MF pada tahun 2005. Sekalipun tidak tercatat di kantor KUA, AL merasa lebih berhak atas semua yang dimiliki suami. Apalagi saat menikah, MF belum menjadi pejabat. Sebagai bentuk perlawanan, AL menekan MF untuk menceraikan istri SAH-nya, NH. Akhirnya MF dan NH bercerai secara resmi.

Apa yang dilakukan AL, merupakan bentuk perlawanan terhadap poligami Kiai MF. Menurut AL, dalam keluarga poligami pasti ada konflik antar istri. Dalam keluarga monogami saja sering terjadi konflik, apalagi dalam keluarga poligami. AL tidak yakin, jika ada kiai apalagi non kiai yang berpoligami, para istrinya dapat hidup bersama secara rukun. Hal itu, murni karena istri tidak berani untuk melakukan perlawanan. Istri yang menerima dipoligami, biasanya istri yang merasa kehidupannya sangat bergantung pada suami. Padahal, menurut AL, perempuan juga bisa hidup secara mandiri, apabila mau berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah sendiri.

Penolakan terhadap poligami juga dilakukan oleh Habibah, istri kedua Kiai Toha. Perempuan pesantren asal Arosbaya, Bangkalan ini, memberontak setelah hampir 2 tahun menjalani keluarga poligami. Wanita kelahiran 1958 ini terpaksa menerima lamaran Kiai Toha atas dorongan keluarga. Habibah dibesarkan dalam keluarga pesantren. Sangat patuh dan

menghormati kiai. Keluarga besarnya, mayoritas pernah nyantri, termasuk dirinya. Pada awalnya, Habibah menerima kehidupan keluarga poligami. Setelah berjalan beberapa tahun dan memiliki anak, Habibah tiba-tiba memberontak. Dia pulang ke rumahnya sendiri di Arosbaya. Dia meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas hingga sekarang.

"Hingga sekarang, saya tidak tahu alasan dia (Habibah) pergi dari sini (Rumah Kiai Toha). Sewaktu-waktu datang ke sini jenguk anaknya. Ketika saya tanya kenapa pulang, Dia tidak menjawab. Saya ajak kembali dan tinggal di sini lagi, tidak mau. Saya tidak pernah menceraikan istri-istri saya," wawancara Kiai Toha.

Berdasarkan pengakuan Kiai Toha, dirinya tidak pernah menceraikan istrinya. Dari lima perempuan yang dinikahi, hanya 2 perempuan yang mampu bertahan hingga sekarang. Sementara yang 3 perempuan, hanya bertahan maksimal 2 tahun. Ketiga istrinya itu, pergi sendiri dan minta cerai. Motifnya juga berbeda-beda. Ada yang minta cerai karena tidak mampu menghilangkan rasa cemburu dan tidak bisa beli peralatan *make up*. Kondisi menunjukkan, ada sebuah perlawanan dari perempuan yang menjadi istri poligami kiai di Madura. Perlawanan muncul setelah perempuan menjalani poligami dan merasakan tidak nyaman dengan keluarga poligami. Apalagi, dari sisi belanja memang dibatasi sesuai kemampuan finansial Kiai Toha. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa pengaruh trah Kiai tidak cukup kuat meredam sebuah perlawanan dari perempuan. Kesejahteraan secara finansial menjadi salah satu pertimbangan.

Analisis di atas diperkuat dengan fakta perlawanan yang dilakukan oleh tiga istri Kiai Nuruttaman Buchori, Maslotul Aini, Wasilah dan Solehah. Kiai asal Desa Tlagah, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan ini, menikah sebanyak 7 kali. Istrinya rata-rata

masih berusia 16 tahun. Saat peneliti wawancara, Kiai Nur, panggilan tinggal Nuruttaman Buchori, tinggal serumah dengan 2 istrinya. 5 istri lain, sudah diceraikan dengan alasan berbeda-beda. Peneliti berhasil menghimpun data dari 3 perempuan. Yakni, Maslotul Aini, Wasilah dan Solehah.

Pernikahan Kiai Nur dengan Maslotul Aini menjadi momen yang sangat menegangkan. Santriwati lulusan Madrasah Aliyah (MA) ini merupakan istri kedua. Kiai Nur harus berjuang keras untuk merayu dan meluluhkan istri pertama, agar diizinkan berpoligami. Maslotul Aini merupakan santri Kiai Nur. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat Maslotul Aini bersedia menjadi istri ke 2. Pada awalnya, kehidupan keluarga Kiai Nur bersama dua istrinya, Nurul Maulida dan Maslotul Aini berjalan mulus tanpa gejolak. Setelah berjalan setahun pernikahan Kiai Nur dengan Maslotul Aini, mulai muncul gejolak. Maslotul Aini tidak dapat menghilangkan rasa cemburu kepada kakak madunya dan akhirnya bercerai.

"Saya bercerai dengan istri kedua (Maslotul Aini, red) atas permintaan istri pertama. Istri kedua kurang dewasa, sering cemburu, menunjukkan sikap cemburunya kepada istri pertama dan saya," Wawancara dengan Kiai Nuruttaman Buchori.

Sikap yang ditunjukkan Maslotul Aini, adalah sebuah ekspresi perlawanan halus terhadap suami. Dia sengaja menunjukkan rasa cemburu kepada suami dan istri pertama. Model perlawanan ini lebih elegan dari pada konfrontasi terbuka. Pertimbangannya, Kiai Nur adalah gurunya saat dia nyantri di pondok pesantren Darul Ulum. Maslotul Aini harus menjaga etika dan moral sebagai perempuan hidup di pesantren. Jika perlawanan dilakukan secara terbuka, pasti mendapat sorotan dari keluarganya (orang tua), yang sangat takdim dan menghormati status kiai. Dengan cara

halus tersebut, maka kesan yang tersebar kepada keluarga dan masyarakat, dirinya diceraikan bukan minta cerai.

"Perempuan mana yang tidak memiliki rasa cemburu jika dipoligami. Jika ada yang bisa damai dalam keluarga poligami, itu hanya disembunyikan saja cemburunya. Kalau masalah perasaan pasti sama, bedanya pura-pura mesra apa tidak. Saya tidak bisa berpura-pura mesra dan menerima, sangat berat, yang penting bukan saya yang minta cerai,". Wawancara dengan Maslotul Aini.

Sikap cemburu Maslotul Aini, juga dimiliki oleh Wasilah. Perempuan pesantren kelahiran Batu Ampar pamekasan ini, sejak awal sudah tidak mau menikah dengan kiai yang sudah beristri. Akan tetapi, dia tidak kuasa menolak bujukan pamannya yang merupakan teman akrab Kiai Nur. Setelah 1,5 tahun hidup keluarga poligami, Wasilah tidak kuasa menyimpan rasa cemburu. Dia sering emosi atas dorongan sifat cemburu. Hingga akhirnya bercerai tanpa memiliki anak. Apalagi, dalam keluarga Kiai Nur, posisi istri pertama sangat istimewa. Setiap keputusan keluarga harus mendapat pertimbangan utama dari istri pertama. Hal inilah yang semakin menambah emosi Wasilah tidak terbendung. Model perlawanan Wasilah tidak jauh berbeda dengan Maslotul Aini.

Berbeda dengan Wasilah dan Maslotul Aini, perlawanan yang dilakukan Solehah, secara terbuka. Perempuan asal Jember ini, berani menggugat cerai kepada suaminya, Kiai Nur, meski tidak melalui pengadilan agama. Dasar gugatannya, karena si suami tidak mampu mengakomodir keinginannya. Sejak awal menikah, Solehah sudah minta dibuatkan rumah tersendiri. Dia menolak tinggal satu rumah dengan istri pertama. Sayangnya, keinginannya itu tidak dipenuhi oleh Kiai Nur, karena dianggap berlebihan. Akhirnya, Solehah minta cerai

dan pulang ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur.

4.5 Memutus Generasi Poligami

Ekspresi perlawanan poligami Kiai bisa dengan cara halus dan jangka panjang. Salah satunya, memutus mata rantai pemahaman poligami kepada anak. Hal ini dilakukan oleh Istri pertama Kiai Toha, Muslihah. Kepada peneliti Muslihah mengaku, tidak bisa menolak poligami Kiai karena sudah menjadi takdir yang harus dijalani. Dia berusaha menjalani takdir itu dengan penuh kesabaran. Perempuan asal Kokop, Bangkalan ini, tidak memungkiri, bagi perempuan sangat berat berbagi suami. Apabila, rasa cemburu muncul, dia melarikan kepada takdir yang harus diterima. Meski demikian, Muslihah berharap serta berdoa, hanya dirinya saja yang mengalami nasib dipoligami. Dia ingin anak-anak perempuannya mendapat suami yang setia dan memiliki banyak istri. Begitu juga harapannya kepada anak-anak laki-lakinya, agar cukup beristri satu.

"Semoga anak-anak saya tidak dipoligami dan tidak berpoligami. Saya takut anak saya (Perempuan, red), tidak sekuat saya. Semua yang saya alami dan rasakan selama ini, Saya ceritakan kepada anak-anak saya," Wawancara dengan Muslihah.

Muslihah menceritakan semua pengalaman pahit yang dia alami sebagai istri poligami Kiai. Itu dilakukan untuk memberikan gambaran kepada anak-anaknya, bahwa keluarga poligami itu tidak lebih baik dari monogami. Sehingga, anak-anaknya tidak melakukan poligami dan tidak mau dipoligami seperti dirinya. Muslihah hanya membuka satu pengalaman pahit dirinya kepada peneliti. Yakni, ketika dirinya selalu menjadi bahan bulian para tetangga dan keluarganya yang tidak pro poligami. Itu terjadi ketika Muslihah berjalan dengan suami dan madunya, seperti ke kondangan, belanja ke pasar dan pulang

ke kampung halaman. Pasti mendapat cibiran yang kurang enak didengar. Untungnya, dia mampu mengabaikan cibiran tersebut, sehingga mampu bertahan sampai sekarang. Pengalaman pahit lainnya, ada yang lebih menyakitkan, tetapi Muslihah tidak bersedia menyampaikan kepada peneliti dengan alasan terlalu privasi.

4.6 Media Sosial Sebagai Sarana

Perlawanan

Pada era digital, media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri. Tidak terkecuali bagi para istri yang menjalani poligami. Diskursus tentang poligami dan perlawanan dapat diungkapkan secara bebas tanpa filter. Sayangnya, tidak semua perempuan dapat bermain-main di media sosial. Ini terjadi karena mayoritas perempuan yang menjadi informan, tidak diperbolehkan memegang ponsel android sama suaminya. Hal ini diakui oleh Kiai Toha dan Kiai Nur. Menurut keduanya, tugas utama perempuan adalah melayani suami. Jika istri diberi akses memegang media sosial, maka keluarga bisa berantakan. Hal ini tidak dapat dibantah oleh istri-istri Kiai Toha dan Kiai Nur. Salah satu penyebabnya, pendidikan para istri Kiai ini, memang sangat rendah. Paling tinggi hanya lulusan MA sederajat SMA.

Kondisi ini berbeda dengan istri kedua KH Abdul Latif Imron, Bupati Bangkalan priode 2019-2024. Ra Latif sapaan, KH Abdul Latif Imron, menikahi perempuan lulusan S1 sebagai istri kedua, Ayu Khoirunita. Perempuan cantik dengan berbagai profesi ini, sangat lihai dalam dunia media sosial. Advokat ini memiliki akun media sosial, seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Perempuan cerdas ini membangun relasi sosial dengan berbagai orang melalui media sosial. Ayu kadang juga menunjukkan perlawanannya terhadap istri pertama Ra Latif, Nyi Zainab melalui status di instagram. Tidak jarang, dia menyindir aktifitas Nyai Zainab sebagai Ketua TP PKK

Bangkalan. Dari beberapa status itu, Ayu ingin menunjukkan bahwa, dirinya memang lebih baik dari istri pertama dalam berbagai hal. Ayu juga berhasil menyita waktu Ra Latif lebih banyak. Momen-momen kemesraan Ayu dengan Ra Latif dan dua putranya, sering *diupload* di media sosial. Ada pesan yang ingin disampaikan, antara lain, kebahagiaan Ra Latif dengan istri kedua.

4.7 Monogami Sebagai Perkawinan Ideal

Dari beberapa perlawanan yang dilakukan para istri kiai, mengisyaratkan bahwa poligami cenderung merugikan perempuan. Secara fisik, psikis dan ekonomi. Mereka sepakat, bahwa keadilan tidak akan pernah ditemukan dalam keluarga poligami. Kepiawaian kiai dalam melakukan hegemoni dan doktrin, mampu menutup kesadaran perempuan. Sehingga, ketika perempuan harus melakukan perlawanan, itu pasti kondisinya sudah sangat menyiksa bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, kaum feminis menyimpulkan, bahwa poligami merupakan bentuk kekerasan yang nyata bagi perempuan.

Dengan beberapa argument rasional, aliran feminis berprinsip, perkawinan yang ideal adalah monogami. Islam sekalipun, bagi kaum feminis, menganjurkan monogamy, sekalipun tidak melarang poligami, dengan syarat yang sangat berat, yakni, adil. (Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005). Secara sosiologis, pernikahan monogami menjadi opsi mayoritas masyarakat di Indonesia. Ini menunjukkan, bahwa umumnya masyarakat lebih suka dengan model perkawinan monogami. Tidak heran, apabila kaum feminis menilai monogami sebagai salah satu kodrat perkawinan manusia. (Mulia, 2004)

Muhammad Anzor dalam tulisannya menyebut 6 alasan utama kaum feminis menolak poligami. *Pertama*, perkawinan poligami sangat mengedepankan budaya patriarki. Dalam keluarga poligami, laki-laki sebagai penggendang otoritas utama dalam

keluarga. Semua keputusan berada di tangan suami. Istri merupakan hak suami. Bahkan, seorang tokoh feminis Perancis, Simone de Beauvoir, istri menjadi hak milik suami lainnya budak. Suami dapat memiliki budak lebih dari satu. *Kedua*, poligami terdapat tindakan yang eksploitatif terhadap tubuh perempuan. Tugas perempuan sebagai tempat reproduksi, pemuas birahi, pelayan suami dan pengasuh anak. Motif poligami Kiai tidak hanya sarana ibadah, tetapi juga untuk kebutuhan biologis. Hal ini diakui oleh Kiai Toha dan Kiai Nur. Masalah seksual bagian dari tujuan poligami. Alasan lain, karena istri mandul atau tidak bisa memberikan anak laki-laki. *Ketiga*, salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah poligami. Menurut Kongres Ulama Perempuan menilai poligami sebagai KDRT. Perempuan yang dipoligami terbebani dengan kompetisi pelayanan dan rasa cemburu. *Keempat*, poligami memelihara rantai kemiskinan. Terutama bagi pria yang berpenghasilan pas-pasan. *Kelima*, Keluarga poligami cenderung memiliki banyak anak. Hal ini mengakibatkan hak anak-anak tidak maksimal. Seperti hak mendapatkan kasih sayang, materi dan pendidikan. *Keenam*, poligami tidak selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Yakni, mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara, termasuk dalam keluarga. (Ansor, 2012)

Melihat hasil penelitian ini, perlawanan yang dilakukan oleh para perempuan yang dipoligami kiai di Madura, masuk kategori aliran feminisme marxisme dan liberal. Dasar perlawanan perempuan pesantren terhadap poligami adalah kesadaran akan kebebasan diri atas tubuh perempuan. Ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh AV dalam menolak tegas lamaran MF sebagai istri ke 3. AV berpandangan, dirinya berhak menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bagi AV pernikahan yang ideal dan didambakan adalah monogami.

Dia lebih memilih menikah dengan pria *single*, sekalipun secara ekonomi dan status sosial, tidak tinggi. Perkawinan adalah kehidupan yang harus dijalani dengan penuh kebahagiaan dan romantis. Begitu juga perlawanan yang dilakukan oleh perempuan lain, berpijak pada aliran ini. Pada awalnya, mereka bersedia dipoligami atas dorongan dan bujuk rayu orang lain, orang terdekat dan keluarga. Padahal, yang akan menjalani adalah si perempuan itu sendiri. Untuk itu, pada saat menjalani poligami, menemukan sejumlah realitas yang tidak sesuai dengan naluri, mereka akan memberontak, dengan minta cerai, pergi meninggalkan suami, hingga menekan suaminya untuk membuang istri pertama.

5. KESIMPULAN

Intisari artikel ini menunjukkan, perempuan pesantren di Madura berani melakukan perlawanan. Baik secara tertutup maupun terbuka. Perlawanan tertutup ditunjukkan dengan konflik antar istri, menuntut pemisahan rumah, menunjukkan rasa cemburu dan melawan perintah suami dalam rumah tangga. Sementara perlawanan terbuka dilakukan dengan meminta cerai tanpa melalui pengadilan. Gugatan cerai ini dilakukan setelah beberapa tahun menjalani keluarga poligami. Perlawanan terbuka juga dengan cara mengambil alih peran utama dari istri pertama. Misalnya, seharusnya dalam sebuah acara suami mengajak istri pertama, tetapi dialihkan untuk mengajak istri kedua. Perlawanan terbuka juga dilakukan sebelum menikah. Calon istri dengan tegas menolak, setelah mengetahui Kiai yang hendak menikahi, sudah memiliki istri. Perempuan yang berpijak pada feminisme Radikal ini, tidak menghiraukan pandangan orang lain. Sebab, menurut perempuan ini, yang mau menjalani rumah tangga itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Begitu juga apabila terjadi sesuai yang tidak sesuai dengan keinginan, yang rugi si perempuan itu sendiri bukan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansor, M. (2012, Juni). Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Lansia Aceh. *Ulumuna*, 172-174.
- Astuti, Tri Marhaeni P. (2011). *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Corliana, T. (2017). Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami Sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriarki. *THE 1st UICIHSS UHAMKA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES* (p. 20). Jakarta: UHAMKA PRESS.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Faisol, A. (2016, Nopember). Perubahan Sosial Dalam Praktek Poligami di Indonesia: Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser. *Vicratina*, 1-2.
- Fakih, M. (1996). *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Farid, M. (2017). Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai Di Madura. *Universitas Airlangga Library*, 60-70.
- Gamas, P. A. (2012). Perlawanan Perempuan Akibat Ketidakadilan Gender dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari. *Students e Journal*, 4-5.
- Jannah, S. R., Musta'in, & Yuyun Wahyu Izzati. (2020). Resistance of Polygamous Women: A Normative Sociological Analysis of Polygamy in Pesantren. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 1-2.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa*, 7-9.
- Kusumandari, E. (2014). *Representasi Perlawanan Perempuan Terhadap Ideologi Patriarki dalam Film Potiche Karya Francoiz Ozon*. Jakarta: FIB UI.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Musyarrofa, I. (2005). Poligami: Antara Legalitas Formal dan Legalitas Budaya, Studi Kasus Praktik Poligami Kiai Pesantren Di Probolinggo Jawa Timur. *Al Mawarid*, 204-205.
- Norannabiela. (2013). *Perlawanan Perempuan Lajang terhadap Norma Budaya Patriarkat: Kajian Feminis terhadap Nayla Tokoh Utama Novel Nayla Karya Djenar Maisya Ayu*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurmila, N. (2011). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiation Polygamy in Indonesia*. Australia: Routledge.
- Roibin. (2007). Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai: Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur. *El-Qudwah*, 9-10.
- Sa'dan, M. (2015). Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Di Madura. *Esensia*, 3-4.
- Warsito. (2012). *Sejarah Muncul dan Berkembangnya Feminisme dan Gender*. Makalah di <http://thesmartestteacher.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-muncul-dab-berkembang.html>